



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 09 Juni 2021

Halaman: 5

PENCEGAHAN COVID-19

Tak Semua OPD Bisa Sistem WFH-WFO

DANUREJAN—Pemda DIY menyebut tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) bisa secara tertib menerapkan sistem *work from home* (WFH). Ada pegawai yang harus masuk karena beban tugas yang harus diselesaikan.

Ujang Hasanudin & Sirojul Khafid
redaksi@harianjogja.com

Secara umum Pemda DIY mengklaim sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemda DIY masih menerapkan dengan sistem 50% WFH dan 50% *work from office* (WFO). Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan sebetulnya penerapan aturan WFH-WFO yang paling penting adalah dalam rangka menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan di kantor. "Kalau ada tugas mendesak kemudian di lokasi [OPD] itu memungkinkan bisa

WFO maupun WFO pada prinsipnya sama-sama bekerja atau bukan libur.

Pemda DIY mengklaim tetap menyesuaikan dengan aturan WFH-WFO 50:50 selama PPKM Mikro.

ada jarak dan tidak ada kerumunan saya kira enggak ada masalah [yang WFH jadi WFO]," kata Baskara Aji, saat ditemui di kompleks Kepatihan, Selasa (8/6). Karena yang WFH maupun WFO pada prinsipnya sama-sama bekerja atau bukan libur.

Menurut Baskara Aji dalam penerapan sistem WFH dan WFO terjadi dua persoalan, yakni bisa menjaga jarak atau menyelesaikan pekerjaan. Keduanya, kata dia, harus bisa berjalan dengan baik. "Silakan saja yang WFH diundang jadi WFO karena harus menyelesaikan tugas mendesak tetapi protokol kesehatannya tetap harus dilakukan," ujar Baskara Aji.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) ini mengklaim Pemda DIY tetap menyesuaikan dengan aturan WFH-WFO 50:50 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Namun terkadang kebutuhan masing-masing OPD juga berbeda terkait dengan kondisi tempat tugas dan beban tugas. Sehingga terkadang ada yang seharusnya WFH dipanggil untuk WFO karena ada tugas dadakan. Baskara Aji memcontohkan OPD itu misalnya Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol.

Kepala Bagian Humas Biro UHP Pemda DIY Ditya Nanaryo Aji mengatakan intiansinya merupakan OPD pelayanan kegiatan pimpinan atau kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemda DIY, sehingga terkadang ASN yang mendapat jatah WFH harus datang ke kantor untuk menyelesaikan tugasnya di kantor atau di lapangan.

Menurut dia, pada dasarnya WFH dan WFO adalah tetap bertugas. Hanya tempatnya yang berbeda. Sehingga terkadang ada yang seharusnya WFH terpaksa diminta datang ke kantor atau lapangan untuk bekerja, seperti meliputi kegiatan yang dilakukan Pemda DIY. Ia menekankan protokol kesehatan tetap menjadi hal yang utama dilakukan.

Pemkot Jogja

Di sisi lain Pemkot Jogja mengklaim masih menerapkan porsi 50:50 untuk WFH dan WFO. Menurut Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, sejauh ini tidak menemukan banyak kasus di kantor.

Dalam penanganan persebaran kasus Covid-19, Pemkot Jogja melihat berbagai potensi dan kejadian yang ada. Apabila mendapatkan pertumbuhan kasus di suatu wilayah atau jenis kegiatan, maka Pemkot Jogja akan fokus di situ.

"PPKM Mikro kami ikuti. Tetapi kebijakan khusus melihat perkembangan di daerah yang berbeda-beda," kata Heroe, Selasa.

AWAS CORONA!

Instansi	Nilai Berita	
1.	☐ Negatif	☐ Am
2.	☐ Positif	☐ Seg
3.	☐ Netral	☐ Bias
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005